

PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI MESIR TERHADAP KELOMPOK HAMAS TAHUN 2015

Habib Budiman

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study of foreign policy after Military coup that occurred in Egypt in 2015. The chaos which finally brought down President Mursi gave a big impact on Egypt's Foreign Policy, especially against the Hamas Group and the struggle for Palestinian independence. This was due to security threats and chaos in the domestic political situation with the polarization of the Egyptian people into two camps, Pro Mursi and Anti Mursi which led to acts of violence against demonstrations and threats from groups of armed militants operating on the Sinai Peninsula who attacked security forces and civilians. Thus the Military took power by lowering Mursi's forced and considered Mursi as Egypt's national threat on charges of causing riots and having relations with militant groups. This research conducted by using qualitative method by compiling secondary data through library research. The data are obtained and processed from books, journals, science articles and trustworthy websites. This research is done using behavioralism approach and hypothesis offered is analyzed by using explanation technique. To explain problems of this research is used Foreign Policy by Rosenau with related analyst levels, the result of analysis is that; there is a change in Egyptian foreign policy towards the Palestinian Hamas group in 2015 with a change of leadership in Egypt. The Egypt President changes very determine the direction of Egypt foreign policy, especially about Palestine independence relation.

Abstrak: Studi ini fokus pada kebijakan luar negeri setelah kudeta militer yang terjadi di Mesir pada tahun 2015. Kekacauan yang akhirnya menjatuhkan Presiden Mursi memberi dampak besar pada Kebijakan Luar Negeri Mesir, terutama terhadap Kelompok Hamas dan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Ini disebabkan oleh ancaman keamanan dan kekacauan dalam situasi politik dalam negeri dengan polarisasi rakyat Mesir menjadi dua kubu, Pro Mursi dan Anti Mursi yang menyebabkan aksi kekerasan terhadap demonstrasi dan ancaman dari kelompok-kelompok militan bersenjata yang beroperasi di Semenanjung Sinai yang menyerang pasukan keamanan dan warga sipil. Dengan demikian Militer mengambil alih kekuasaan dengan menurunkan paksa Mursi dan menganggap Mursi sebagai ancaman nasional Mesir atas tuduhan menyebabkan kerusuhan dan memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok militan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menyusun data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data diperoleh dan diproses dari buku, jurnal, artikel sains dan websites yang dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan behaviorisme dan hipotesis yang diajukan dianalisis dengan menggunakan teknik eksplanasi. Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan Kebijakan Luar Negeri Rosenau dengan tingkat analisis terkait, hasilnya jika analisis itu; ada perubahan dalam kebijakan luar negeri Mesir terhadap kelompok Hamas Palestina pada tahun 2015 dengan perubahan kepemimpinan di Mesir. Perubahan Presiden Mesir sangat menentukan arah kebijakan luar negeri Mesir, khususnya tentang hubungan kemerdekaan Palestina.

Kata Kunci: perubahan politik, kelompok Hamas, Palestina

PENDAHULUAN

Setahun pasca terpilihnya Mohammad Mursi sebagai presiden Mesir, kondisi politik dan keamanan Mesir kembali bergejolak. Munculnya perpecahan di Mesir tidak bisa dihindarkan ketika Mursi dianggap gagal membawa Mesir ke arah yang lebih baik. Mursi dianggap gagal menstabilkan keamanan dan menyelesaikan krisis ekonomi, dan ditambah dengan keberadaan kelompok oposisi yang menganggap bahwa Mursi mencoba terlalu memusatkan kekuasaan ke tangan Ikhwanul

Muslimin. Gelombang demonstrasi dilakukan oleh gerakan *Tamarod* (pembangkangan) yang menginginkan agar presiden Mursi untuk turun dari jabatannya.

Sejalan dengan demonstrasi tersebut, militer mengeluarkan ultimatum agar Presiden Mursi melakukan rekonsiliasi nasional dalam 48 Jam. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Jenderal Abdul Fatah As sisi tersebut menuntut agar Presiden Mursi segera mencari jalan keluar atas krisis politik dan keamanan yang terjadi. Ultimatum tersebut menjadi awal dari bentuk

kudeta awal yang dilakukan junta militer, Kudeta yang terjadi tepat pada 3 Juli 2013 ketika Jenderal Asisi sebagai Menteri Pertahanan dan salah satu pimpinan tertinggi SCAF (*Supreme Council of the Armed Forces*) mengumumkan bahwa posisi Presiden Mesir telah digantikan oleh Presiden sementara Adly Mansour, yang sebelumnya merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digulingkannya Mursi dari kursi kepresidenan menandakan babak baru dalam pemerintahan Mesir. Dibekukannya konstitusi dan dilakukannya pemilu yang dipimpin oleh pemerintahan bentukan Militer, membawa Jenderal Abdul Fatah As sisi terpilih sebagai presiden. Tindakan anti-demokrasi yang dilakukan junta militer tersebut disambut rakyat yang menentang kudeta tersebut dengan melakukan demonstrasi dan melakukan aksi bertahan di *Rab'a Al Adawiyah* wilayah *Nasr City* dan di *Nahda Square* di wilayah Giza. Aksi demonstrasi terus meluas ke berbagai wilayah di Mesir, Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi yang aktif menentang kudeta dan memboikot Pemilu menjadi target operasi dari Militer, dan setidaknya lebih dari 6000 demonstran tewas dan ribuan lainnya dijebloskan ke penjara.

Krisis keamanan dan politik yang terjadi di Mesir, membuat Presiden Asisi membuat kebijakan yang tegas untuk menjaga stabilitas keamanan Negara. Didalam pidatonya ia mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata dan toleransi terhadap orang yang melakukan kejahatan dan pembunuhan sebagai alat untuk menggagalkan rekonsiliasi dalam era baru yang dipimpinnya.

Dengan mengatasnamakan kestabilan dan keamanan nasional, pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap semua kegiatan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya terhadap keamanan negara. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah berupa penjatuhan vonis pelarangan dan penjatuhan vonis teroris. Didalam negeri diawali ketika vonis tersebut dijatuhkan kepada organisasi Ikhwanul Muslimin, yakni ketika pengadilan Mesir melarang segala bentuk kegiatan dari

Ikhwanul Muslimin pada 23 September 2013. Dampak dari keputusan pengadilan tersebut berupa penyitaan setiap asset yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin dilanjutkan dengan pembubaran 112 LSM yang diduga berafiliasi dengan organisasi tersebut.

Penjatuhan vonis teroris oleh pemerintah Mesir berdampak luas. Tidak hanya kepada organisasi dalam negeri yang dianggap berbahaya vonis juga dijatuhkan terhadap organisasi yang berada di lingkup luar negeri. Hamas sebagai sebuah gerakan perjuangan rakyat Palestina juga terkena dampak dari keputusan tersebut. Pergerakan Hamas terpusat di Jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Semenanjung Sinai di Negara Mesir. Kedua Negara tersebut terhubung dengan pintu perbatasan Raffah yang menjadi akses untuk masuk ke Jalur Gaza setelah pemboikotan yang dilakukan Israel. Dengan semakin memanasnya kondisi semenanjung Sinai akibat dari munculnya kelompok militan yang melakukan penentangan terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Asisi, membuat Hamas secara langsung atau tidak langsung dituding terlibat didalamnya.

Tidak hanya keamanan politik Mesir yang terancam, keamanan wilayah Mesir juga ikut terancam ketika kelompok Militer di perbatasan Mesir Utara melancarkan aksi serangan dan tindakan teror. Serangan yang dilakukan oleh militan tersebut ditujukan kepada aparat keamanan dan militer Mesir dan juga terhadap wilayah Israel.

Melalui situasi tersebut Pemerintah Mesir melalui pengadilan Mesir untuk isu Mendesak pada tanggal 28 Februari 2015 memasukkan Hamas ke dalam draft Organisasi teroris setelah sebulan sebelumnya pengadilan Kairo tersebut juga telah menjatuhkan vonis teroris terhadap kelompok sayap Militer Hamas, Brigade Al-Qassam yang tentu saja memberikan dampak yang sangat besar terhadap hubungan Mesir dengan Kelompok Hamas Palestina.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perilaku (behavioralism)

dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem analisis behavioris (Sistem Analisis Perilaku). Dalam arti unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan. Pendekatan ini lebih berawal dari teori sistem, yakni membawa kenyataan (termasuk kenyataan lingkungan). Behavioris bermaksud membangun teori sistemik dan penjelasan proses kebijakan luar negeri secara umum. Hal ini dicapai dengan menggabungkan dan menjadikan satu berbagai data, dan dengan menjelaskan isi serta konteks kebijakan luar negeri sejumlah negara. Hal tersebut secara teoritis dimuat dalam 'pra-teori' kebijakan luar negeri James Rosenau (1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Stabilitas Politik dan Keamanan Mesir

Tumbangnya rezim Husni mubarak pada tahun 2011 yang berkuasa kurang lebih 30 tahun di Mesir mengantarkan Mesir ke arah yang lebih baik Demokrasi. Hal itu dapat dilihat dari keinginan jutaan demonstran yang dari semula menginginkan perubahan dan menuntut Mubarak untuk turun dari kursi kepresidenan.

Penyelenggaraan Pemilu secara demokratis pasca mundurnya Husni Mubarak berlangsung sangat sengit dan ketat. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2012 menjadi momen yang sangat penting bagi Mesir. Dalam pemilu putaran pertama tersebut meloloskan Dua kubu yang memperebutkan kekuasaan secara umum seolah-olah mempresentasikan kelompok-kelompok yang diwakilinya sesuai dengan ideologi dan aspirasi politik masing-masing. Kubu Islamis oleh Muhammad Mursi yang merupakan pimpinan Partai Kebebasan dan Keadilan yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin menghadapi kubu *status quo* yang berisikan orang-orang pendukung Mubarak yang diwakili oleh Ahmed Shafiq.

Meskipun demikian pemilihan umum putaran kedua yang digelar dengan situasi dan

kondisi yang damai mengantarkan Mursi keluar sebagai pemenang yang berhak menduduki kursi kepresidenan dengan perolehan suara sebanyak 52,74% sedangkan saingannya Shafiq memperoleh 47,26% suara.

Tepat memasuki satu tahun kepemimpinan Mursi sebagai presiden Mesir yang keempat ditandai dengan gelombang aksi protes yang berpusat di Tahrir Square untuk menuntut Mursi turun dari jabatannya. Aksi yang digagas oleh gerakan *Tamarrod* tersebut meluas kebeberapa berbagai kota di Mesir, diantaranya kota pelabuhan Aleksandria dan Port Said.

Tidak bisa dielakkan bahwa jatuhnya kepemimpinan Mursi disebabkan oleh gerakan *Tamarod* yang berafiliasi dengan dukungan Militer. *Tamarod* sendiri memiliki arti pembangkang atau pemberontak. Sejak awal tahun 2013 telah memulai aksinya dan mengumpulkan masa dan dukungan untuk melakukan demonstrasi anti pemerintah yang kemudian aksi-aksi kelompok ini menjadi alasan oleh Jenderal As Sisi untuk menekan dan mengancam kekuasaan Mursi.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan *Tamarod* benar-benar untuk mendestabilkan Pemerintahan Mursi dan kehidupan rakyat Mesir. Rangkaian demonstrasi yang dilakukan yang kemudian intensif diberitakan media-media baik lokal maupun internasional semakin menyudutkan pemerintahan Mesir sehingga seolah-olah hal itu merupakan tuntutan dari rakyat Mesir. Kuatnya opini yang berkembang di masyarakat melemahkan wibawa pemerintah dan memberikan kesempatan terhadap pihak militer untuk mengambil alih situasi.

Tanggal 1 Juli 2013 Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang di pegang oleh Jenderal Abdel Fattah al-Sissi melontarkan ancaman terhadap pemerintah terkait situasi yang terjadi di Mesir. Asissi menyatakan memberikan waktu 48 Jam untuk presiden Mursi melakukan rekonsiliasi nasional untuk mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi yang terjadi. Apabila tidak dapat diselesaikan maka Militer akan mengambil alih situasi.

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013 sete-

lah berakhirnya ultimatum yang disampaikan Militer terhadap pemerintah, pukul 21.00 Assisi mengumumkan kepada dunia bahwa Mesir dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi hingga terpilihnya presiden baru. Dengan demikian Kudeta Militer yang dilakukan Asisi mengakhiri kepemimpinan Mursi. Muhammad Mursi menjabat sebagai Presiden Mesir terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 dan berakhir dengan kudeta militer pada tanggal 3 Juli 2013. Maka kepemimpinan Mursi hanya berumur 1 tahun 3 hari dengan rangkaian kerusuhan yang akhirnya menjatuhkan Mursi telah dimulai pada awal tahun 2013.

Rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi menuntut penurunan Mursi mulai memakan korban jiwa, tidak hanya itu pengerahan tentara dan keadaan darurat juga dilakukan di tiga kota di sekitar terusan Suez yakni Port Said, Ismaili, dan Suez menyusul kerusuhan yang terjadi. Selain itu unjuk rasa disertai dengan kerusuhan mulai meluas dan menyebar diberbagai kota di Mesir seperti di Aleksandria, dan mencapai puncaknya ketika massa mengadakan demo besar-besaran yang berpusat di Tahrir Square, di ibu kota Kairo.

Semakin memanasnya situasi membuat rakyat Mesir terpolarisasi menjadi masa pro mursi yang mentang adanya kudeta dan masa anti mursi terus mendesak Mursi untuk turun bahkan meminta Mursi ditangkap. Rakyat yang menentang kudeta merespon tindakan yang dianggap anti demokrasi dari militer melalui kudeta dengan melakukan aksi bertahan (*sit-in*) di Rab'a Al Adawiyah wilayah Nasr City dan di Nahda Square di wilayah Giza. Dari kedua tempat tersebut memicu gelombang aksi demonstrasi di beberapa titik di luar kota Kairo. Militer yang sudah mengambil alih pemerintahan dan sektor keamanan merespon demonstrasi tersebut dengan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya 36 korban tewas di pihak sipil sampai dengan 4 Juli 2013 Pasca Mursi digulingkan.

Aksi demonstrasi yang berlanjut pada kerusuhan dan kekerasan di Mesir pasca Kudeta Militer membawa mesir kearah krisis kemanusiaan dimata Internasional dan membawa

dampak yang sangat buruk terhadap stabilitas keamanan dalam negeri Mesir.

Dalam laporan Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir menyebutkan bahwa angka kekerasan setelah kudeta militer terus bertambah dan memasuki fase yang mengkhawatirkan yakni telah masuk kedalam Kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Aparat militer bersenjata lengkap melakukan serangan kepada para demonstran yang terpusat di Rab'a al adawiyah dan Nahdha Square, dan perkiraan jumlah korban yang tewas dalam peristiwa tersebut berkisar 638 korban tewas (versi Kementrian Kesehatan Mesir), 2600 korban tewas (versi Rumah Sakit Darurat) atau 4712 korban tewas (versi Prof. Dr. Salah Soltan).

Disisi lain konsentrasi militer mesir juga terpecah karena adanya ancaman keamanan di semenanjung Sinai wilayah Mesir utara. Selain berusaha menjaga kestabilan politik dan keamanan karena unjuk rasa dan aksi kekerasan dari para demonstran, militer Mesir juga mengerahkan kekuatan untuk mengamankan situasi dan keamanan oleh ancaman kelompok-kelompok militan yang berusaha mengancam keamanan melalui bahkan ingin melepaskan diri dari wilayah Mesir melalui aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil.

Apabila melihat dari metode dan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan ekstrimis disinai, aksi teror yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu kelompok akan tetapi beberapa kelompok yang memiliki motif yang berbeda-beda, diantaranya :

- *Tauhid wal Jihad*, kelompok ini beroperasi di Jalur Gaza dan Sinai, sehingga kerap menyerang siapapun yang diidentifikasi sebagai warga Israel.

- *Ansar Beit al-Maqdis*, kelompok militan yang mulai aktif sejak tahun 2011. Serangan yang dilakukan mulai gencar setelah Mursi diturunkan pada tahun 2013 yang ditargetkan terhadap pos-pos militer dan helikopter-helikopter militer mesir. Tidak hanya melakukan terhadap aparat kemanan, kelompok ini juga melakukan penyerangan terhadap warga

sipil. Kelompok ini kemudian juga melancarkan serangan terhadap jalur pipa-pipa minyak dan gas yang membentang di Sinai.

- *Majlis Syura Mujahidin*, kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap pihak-pihak Israel di perbatasan Sinai. Kelompok ini ditengarai memiliki hubungan dengan Al-Qaidah. Namun belum bisa dipastikan apakah merupakan jaringan resmi Al-Qaidah atau bukan.

- *Anshar Asy-Syariah*, Kelompok ini muncul dengan tujuan untuk menegakkan syariat dan mendirikan negara Islam di Mesir. Kelompok ini juga sering mengkritik langkah-langkah Ikhwanul Muslimin yang dinilai kurang agresif dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam di Mesir.

- *Al-Furqan*, serangan yang cukup dikenal dari kelompok ini terjadi pada 31 Agustus 2013 dengan melakukan penyerangan ke arah kapal-kapal kargo China yang melintasi terusan Suez menggunakan *rocket-propelled grenade* (RPG).

- *Jaisyul Islam*, Kelompok ini dinilai cukup mendominasi gerakan Islam di Gaza, memiliki kemampuan operasional paling mumpuni dibanding kelompok lainnya di Gaza. Mereka menjadikan jihad sebagai jalan perjuangan membebaskan Palestina. Kedekatannya dengan Hamas membuat Jaisyul Islam leluasa bergerak baik di wilayah Gaza maupun wilayah Mesir, di Sinai terutama. Berbeda dengan Hamas, kelompok ini menuntut islamisasi secara cepat di Gaza. Sementara Hamas lebih memilih proses islamisasi secara perlahan dan bertahap.

Situasi keamanan di Semenanjung Sinai telah memburuk sejak 2011 ketika Presiden Husni Mubarak diturunkan. Akan tetapi bertambah parah ketika Mursi berhasil kudeta pada Juli 2013. Nyaris setiap hari terjadi serangan-serangan militan terhadap aparat keamanan. Untuk korban dari pihak aparat keamanan tidaklah sedikit, setidaknya 28 orang polisi dan 21 tentara Mesir telah tewas dalam rangkaian serangan kelompok militan terhitung sebulan pasca kudeta bulan Juli 2013.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menjadikan daerah Sinai menjadi daerah yang didalamnya terdapat kelompok-kelompok militan yang tumbuh subur dan berani melancarkan aksinya, diantaranya adalah :

Pertama, Faktor Ekonomi dan Geografis. Faktor ekonomi menjadi pemicu hadirnya gerakan-gerakan pemberontakan dan militan di Sinai. Secara geografis, wilayah Sinai diberkahi oleh pantai yang indah dan sumber daya minyak. Tahun 1990an investasi besar memasuki wilayah Sinai. Wilayah selatan mulai berdiri resort-resort mewah. Lokasi itu awalnya merupakan desa nelayan warga asli Sinai. Kehadiran resor-resor mewah tersebut membuat warga setempat tersingkir dan kehilangan pekerjaan sebagai nelayan. Selain itu, sumber daya alam yang berada di Sinai juga dikuasai pemerintah dan pendatang. Terutama sumber daya minyak dan Gas yang dimana jalur pipa gas yang mendistribusikan energi dari Mesir ke Israel dan Yordania. Dengan adanya kesenjangan sosial membuat mayoritas penduduk Sinai adalah penduduk termiskin di Mesir. Minimnya akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi menyeret warga Sinai kepada kemiskinan dan kriminalitas.

Kedua, gejolak politik yang mengiringi lengsernya diktator Mesir, Husni mubarak, melalui revolusi rakyat dan kemudian dilantikannya tokoh Ikhwanul Muslimin, Mohammad Mursi sebagai presiden yang telah menjadikan kawasan Sinai semakin 'tak berhukum'. Sinai sekarang dianggap sebagai wilayah yang kosong dari penjagaan keamanan (*security vacuum*). Penggulingan Mursi membuat iklim politik semakin kacau dan dimanfaatkan kelompok-kelompok jihadis. Kondisi ini sangat mendukung bagi menjamurnya aksi-aksi kekerasan dan aktivitas penyelundupan senjata melalui terowongan-terowongan ke Jalur Gaza.

HAMAS (*Harakah al Muqawwamah al-Islamiyyah*) merupakan gerakan perlawanan rakyat nasional yang bergerak demi menciptakan situasi kondusif untuk merealisasikan kemerdekaan rakyat Palestina, membebaskan mereka dari penganiayaan, membebaskan

bumi mereka dari penjajah Israel serta untuk menghadang proyek zionisme yang didukung oleh Imperialisme Modern.

Secara tujuan dan pergerakan Hamas merupakan organisasi yang berkeinginan membebaskan dan membela hak-hak Palestina yang memiliki basis di Jalur Gaza Palesina. Akan tetapi Pemerintah Mesir memiliki tuduhan-tuduhan terhadap Hamas terkait dengan kewanancian dalam negerinya. Karena tidak bisa ditampik bahwasanya Hamas memiliki basis dukungan masa yang besar di Mesir.

Disatu sisi Pemerintah Mesir berupaya menstabilkan kewanancian politik dan masyarakatnya karena terpolarisasinya masyarakat Mesir dan kekacauan akibat demonstrasi dan disisi lain menghadapi ancaman kewanancian dengan kelompok bersenjata di Sinai.

Terowongan bawah tanah ini sebenarnya sudah ada dan beroperasi sejak tahun 1978 sejak Mesir menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel serta kembalinya Semenanjung Sinai ke tangan Mesir. Penggalian terowongan bawah tanah di Jalur Gaza semakin meningkat pada tahun 2006-2007 ketika Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006. Terlebih ketika semua akses dan jalur menuju Gaza baik darat, laut dan udara diblokade oleh pemerintah Israel maupun Mesir.

Perubahan Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Kelompok Hamas Palestina

Untuk mengatasi permasalahan Politik dan Kewanancian Pemerintah Mesir melakukan berbagai tindakan yang dianggap akan menstabilkan keadaan dan menjaga kewanancian Mesir dari kelompok-kelompok militan serta dalam upaya meredam konflik di kawasan dan menstabilkan kewanancian Mesir melakukan dua pendekatan dalam menghadapi aksi-aksi teror dan ideologi yang dianggap radikal di negaranya sebagai dampak kawasan dengan cara *Soft Power* dan *Hard Power*.

Semenjak dijatuhkannya vonis Hamas sebagai kelompok teroris oleh Pengadilan Mesir (*The Cairo Court of Urgent Affairs*) pada tanggal 28 Februari 2013 membuat semua

aktifitas yang berkaitan dengan Hamas menjadi terlarang di Mesir, pemerintah Mesir juga memerintahkan penutupan kantor Hamas yang berada di negara tersebut. Melalui keputusan tersebut semua aktifitas dan orang-orang yang dianggap terlibat dengan Hamas ditangkap aparat kewanancian Mesir. Sejumlah anggota Hamas ikut diadili bersama Mursi terkait tuduhan kerusakan yang terjadi di Mesir.

Vonis teroris itu juga mengakibatkan penyitaan semua aset-aset yang dimiliki Hamas di Mesir dan semua aset orang-orang yang diduga berafiliasi dengan Hamas. Bank Sentral Mesir juga telah melakukan penyitaan dan pembekuan kekayaan dan aset-aset Hamas di Mesir perintah tersebut dilakukan karena dinilai akan membahayakan kewanancian nasional Mesir.

Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika Mursi berkuasa, dimana Hamas diberi keleluasaan melakukan berbagai aktifitas di Mesir. Bahkan pada tahun 2012 Hamas melakukan pemilihan rahasia internal di Mesir tidak hanya itu seorang pejabat tinggi Hamas Dr. Musa Abu Marzouk tinggal di Kairo.

Dampak peralihan kepemimpinan di Mesir memberi dampak yang sangat signifikan terutama dalam kebijakan luar negeri Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disebabkan pemegang keputusan utama adalah Presiden dan Militer yang menguatkannya. Perbandingan yang sangat kontras dapat dilihat ketika Era Mursi dan Pasca Kudeta Militer Jenderal Asisi.

1. Era Presiden Mursi (sebelum kudeta)

Presiden Mursi berkuasa setelah pemilu menumbangkan rezim Husni Mubarak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Ikhwanul Muslimin sebagai basis utama dari Mursi sebagai kadernya. Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan kelompok yang sangat simpati dan memberikan dukungan pada perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Pergantian kepemimpinan dari Mubarak ke Mursi mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan Mesir terhadap perjuangan Palestina. Status baru yang diberikan kepada Palestina oleh PBB yakni

status *Permanen Observer* adalah bentuk kuatnya dukungan Internasional terhadap Palestina, status ini didukung oleh 138 negara termasuk Mesir sehingga menghasilkan resolusi 67/19 Majelis Umum PBB (Resolusi Majelis Umum PBB no. 67/19, 2012). Hal tersebut merupakan bukti keberpihakan Mesir yang tegas terhadap Palestina.

Dukungan Presiden Mursi juga tampak konkret terhadap Palestina dengan membuka pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan wilayah Sinai dan Gaza. Perbatasan itu menjadi jalur penting bagi masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan logistik domestik masyarakat Palestina terutama Jalur Gaza setelah mengalami blokade ketat dari Israel. Selain itu Mesir juga memberikan bantuan ekonomi, bahan bakar dan gas ke Palestina. warga Palestina diizinkan masuk tanpa menggunakan visa, perbatasan dibuka selama 12 jam dan dibuka enam kali dalam seminggu dengan mekanisme penduduk Gaza yang berusia 18-40 tahun dikenakan wajib lapor untuk melintasi perbatasan sedangkan wanita dan anak-anak tidak perlu melapor, tidak hanya pembebasan visa di perbatasan Rafah, pihak otoritas bandara Mesir juga memberikan izin kepada warga Palestina untuk memasuki negara tersebut tanpa visa. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi warga Jalur Gaza akan tetapi juga berlaku bagi warga Palestina yang berada di Tepi Barat dan Yerusalem. Kemudian komunikasi intensif antara Mursi dan Hamas kerap dilakukan untuk mencegah instabilitas yang terjadi di Gaza, Sebagai bentuk perwujudan komunikasi tersebut Mursi mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Hamas Palestina Khaled Meshaal pada tanggal 19 Juli 2012.

2. Era Jenderal Asisi (Pasca Kudeta Militer)

Kebijakan Mesir terhadap Palestina khususnya jalur Gaza berubah drastis pasca penggulingan Mursi pada 3 Juli 2013 oleh militer. Tindakan yang paling jelas dapat dilihat dari penutupan perbatasan Rafah yang membuat Gaza kembali mendapat blokade dari dua arah, yakni dari Israel dan Mesir. Hal tersebut mengakibatkan sekitar 1.5 juta warga Gaza

kembali terisolasi dari dunia luar, dan ribuan warga Palestina termasuk para pelajar dan pasien yang memerlukan pengobatan yang ingin meninggalkan atau masuk ke Gaza ter-tahan di perbatasan, padahal perbatasan Rafah dilalui kurang lebih 1.200 orang perhari.

Selain memblokir kembali jalur Gaza militer Mesir juga membatasi pergerakan penduduk Gaza yang ingin memasuki Mesir lewat jalur yang ilegal yakni melalui terowongan-terowongan bawah tanah. Hal itu dipicu kekhawatiran Mesir terhadap keamanan wilayahnya dari aksi-aksi penyelundupan senjata dan bahan peledak, apalagi adanya penyerangan terhadap aparat keamanan yang disinyalir dilakukan oleh Hamas seperti laporan badan intelijen Mesir. Dalam upaya meredam aksi penyelundupan melalui terowongan selain menghancurkan dengan menggunakan bahan peledak pemerintah Mesir juga mempunyai cara lain dalam melumpuhkan terowongan tersebut, diantaranya adalah dengan membanjiri terowongan tersebut dengan air limbah dan kotoran, taktik tersebut sudah dilakukan semenjak tahun 2013. Selain itu Mesir juga mengisi terowongan tersebut dengan air laut dengan meletakkan pipa sejajar dengan zona penyangga. Air dari laut dipompa masuk sehingga membuat kanal dan saluran air tersebut akan membanjiri terowongan dan menyebabkan terowongan itu runtuh.

SIMPULAN

Revolusi pada tahun 2011 dan kudeta Militer yang menggulingkan Mursi menimbulkan adanya peningkatan aktivitas terorisme di kawasan Sinai. Pemerintah Mesir telah berupaya untuk menanggulangi hal tersebut dengan melakukan Operasi militer dan pemberlakuan masa darurat terhadap wilayah Sinai utara. Pemerintah Mesir telah mengeluarkan dekrit yang memerintahkan isolasi dan evakuasi 79 km wilayah perbatasan Gaza dan Sinai.

Kebijakan luar negeri Mesir ditentukan oleh tujuan dari individu pemimpinnya. Di masa kepemimpinan Mursi arah kebijakan Mesir terhadap Hamas sangatlah baik, hal itu dibuktikan dengan dibukanya pintu perbatasan

Rafah dan Mursi memberikan dukungan penuh terhadap Hamas. Hal itu terjadi karena Presiden Mursi merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin yang mempunyai hubungan baik dengan Hamas di Jalur Gaza. Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Asisi, Mesir membatasi pergerakan penduduk Gaza dengan kembali menutup pintu perbatasan hal itu terjadi karena Mesir melihat bahwa Hamas sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional Mesir.

DAFTAR RUJUKAN

- Dekel, Udi & Orit Perlow. *President Morsi and Israel-Egypt Relations: Egyptian Discourse on the Social Networks, July 2012*. INSS Insight. No. 357.
- Dewi, Ita Mutiara, dkk. *Gerakan rakyat Palestina: dari deklarasi negara Israel sampai terbentuknya negara-negara Palestina*. Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2008.
- Draft Buku Putih. *Tragedi Kemanusiaan atas Kudeta Militer di Mesir*. Disusun oleh Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir. 2013.
- F, Adhi C. *Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir dalam konflik Israel-Palestina*. 2012. Journal. Unair. ac.id.
- Hara , Abu Bakar Eby. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2001.
- Iskandar & Faisyal Rani. *Dukungan Mesir terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina 2011-2013*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 2. 2014.
- Jackson, Robert & Georg Sorrensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Lembaga Kajian Syamina. *Sinai, dari bumi wahyu menuju perang suci*. Laporan Reguler Syamina. Edisi VII/ November 2013.
- Pelham, Nicholas. *Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege*. Journal of Palestines Studies, Vol. XLI, 2011
- Russett, Bruce & Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company, 1996)
- Shay, Shaul. *Egypt's War against the Tunnels between Sinai and Gaza Strip*. IPS Publications, January 2016.
- Xuwen, Qian. *The January revolution and the future of Egypt*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia). Vol. 6, No. 2, 2012.
- Yani, Yanyan Mochamad. *Politik Luar Negeri*. Disampaikan pada acara Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007. Tersedia di <http://pustaka.unpad.ac.id>.
- Waskito, A. M. *Air Mata Presiden Mursi*. Pustaka Al-Kautsar : Jakarta. 2013.